

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN TOBA DAN

E – GOVERNMENT DI KABUPATEN TOBA

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Toba

Kabupaten Toba berada di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2021, wilayah administrasinya terdiri dari 16 kecamatan, yang terdiri dari 231 desa, dan 13 kelurahan. Saat ini, Kabupaten Toba dipimpin oleh Ir. Poltak Sitorus sebagai Bupati dan Tonny M. Simanjuntak sebagai Wakil Bupati Kabupaten Toba. Kabupaten Toba saat ini memiliki visi yaitu “Toba Unggul dan Bersinar” dan memiliki “Panca Program” misi yaitu sebagai berikut (tobakab, 2021):

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik
2. Kesenjangan yang Harus Ditutup di Daerah Berkembang
3. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
4. Membangun Karakter dan Budaya Bangsa
5. Perbaikan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Perlindungan lingkungan, kesiapsiagaan bencana, dan perubahan iklim
7. Pemantapan Politik Hukum dan HAM serta Transformasi Pelayanan Publik

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Toba memiliki luas wilayah sebesar 2.021,80 km² atau sebesar 3,19% dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Toba terletak di dataran tinggi antara 900 dan 2.200 meter di atas permukaan laut. Ada 16 kecamatan di Kabupaten Toba. Di Kabupaten Toba, terdapat 109.626 hektar hutan. (2020, BPS Kabupaten Toba).

Gambar 2.1
Letak Geografis Kabupaten Toba



Sumber : <https://tobakab.go.id/>, 2021

Kabupaten Toba memiliki perbatasan antara lain, di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Simalungun. Bagian Selatan Kabupaten Toba berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Bagian barat Kabupaten Toba berbatasan langsung dengan Danau Toba dan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Pakpak Barat. Sementara di bagian Timur Kabupaten Toba berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Asahan (BPS Kabupaten Toba, 2021).

2.1.2 Sejarah Kabupaten Toba

Kabupaten Toba adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Balige adalah ibu kota negara. Kabupaten ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 1998, yang membentuk Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Tapanuli Utara terbagi atas Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Toba Samosir. Kabupaten Toba terdiri dari 13 kecamatan yang dipisahkan menjadi 5 kecamatan, 281 desa, dan 19 kecamatan ketika didirikan.

Gagasan pemekaran Kabupaten Toba menjadi dua kabupaten, Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir, muncul sebagai akibat dari perkembangan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik (mencakup seluruh kecamatan di Pulau Samosir dan sebagian pinggiran Danau Toba. di daratan Pulau Sumatera). Tujuan dibangunnya dua kabupaten ini adalah untuk mempercepat pembangunan sehingga daerah tersebut bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Pada tanggal 3 Maret 2020 diterbitkan PP Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Sumatera Utara.

Jumlah penduduk Kabupaten Toba pada tahun 2020 mencapai 2016.199 penduduk. Dimana penduduk yang terbagi jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki di kabupaten ini. Penduduk laki laki berjumlah yaitu 102.850 penduduk dan 103.349 penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin di Kabupaten Toba yaitu 99,52%. Untuk tingkat pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 0,81%. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Toba mencapai 101,99 jiwa untuk ukuran per kilometer persegi. Penduduk dengan

tingkat kepadatan tertinggi di Kabupaten Toba berada di Kecamatan Balige berjumlah 409,23 penduduk/km², dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan kepadatan penduduk yakni sebesar 26,49 jiwa/km².

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Toba tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Balige	22.279	22.356	44.635
2	Tampahan	2.576	2.565	5.141
3	Laguboti	22.033	11.364	22.397
4	Habinsaran	8.996	8.873	17.869
5	Borbor	4.249	4.050	8.299
6	Nassau	4.637	4.536	9.173
7	Silaen	6.996	7.147	14.143
8	Sigumpar	4.227	4.372	8.599
9	Porsea	7.218	7 451	14.669
10	Pintu Pohon Meranti	3.695	3.651	7.346
11	Siantar Narumonda	3.671	3.764	7.435
12	Parmaksian	5.865	5.691	11.556
13	Lumban Julu	4.995	4.958	9.953
14	Uluan	4.826	4.854	9.680
15	Ajibata	4.697	4.723	9.420
16	Bonatua Lunasi	2.890	2.994	5.884
	TOTAL	102.850	103.349	206.199

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba, 2020

Data BPS (2020), menunjukkan pendudukan Kabupaten Toba didominasi oleh pemeluk agama Kristen Protestan yaitu 182.853 jiwa, diikuti dengan agama Katolik yaitu 15.673 jiwa, kemudian agama islam sebanyak 12.615 jiwa, dan minoritas penduduk Kabupaten Toba memeluk agama Hindu yaitu sebanyak 6

orang penduduk. Sementara itu, untuk pemeluk agama Buddha dan Konghuchu tidak ada di Kabupaten Toba.

Tabel 2.2. Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Toba tahun 2020

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu
1	Balige	3.210	39.713	2.625	6
2	Tampahan	85	4.916	230	-
3	Laguboti	779	21.549	689	-
4	Habinsaran	286	15.951	2.346	-
5	Borbor	95	8.454	41	-
6	Nassau	1.360	6.595	1.509	-
7	Silaen	220	13.437	1.172	-
8	Sigumpar	198	8.629	138	-
9	Porsea	1.496	12.960	538	-
10	Pintu Pohon Meranti	1.796	5.429	422	-
11	Siantar Narumonda	345	6.251	972	-
12	Parmaksian	1.306	9.846	351	-
13	Lumban Julu	434	8.421	1.369	-
14	Uluan	119	8.347	986	-
15	Ajibata	322	7.024	2.229	-
16	Bonatua Lunasi	564	5.331	56	-
	TOTAL	12.615	182.853	15.673	6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba, 2020

2.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Toba telah menguntungkan selama tiga tahun terakhir, menurut Statistik Daerah Toba pada tahun 2021. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB (atas harga berlaku) dengan populasi pertengahan tahun. PDRB per kapita Kabupaten Toba akan mencapai Rp. 28,24 juta pada tahun 2021, meningkat 12,36 persen dibandingkan PDRB per kapita tahun 2017 yang berkisar Rp. 25,13 juta. Kabupaten Toba menduduki peringkat ke-7 di Sumatera Utara

dalam hal PDRB per kapita tahun 2018, di belakang Batubara, Medan, Deli Serdang, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Kota Binjai. Pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, perdagangan, dan industri semuanya berkontribusi terhadap kemakmuran ekonomi Kabupaten Toba.

BPS (2020), menyebutkan total angkatan kerja di Kabupaten Toba mencapai 54.865 orang, dengan 48.747 orang penduduk bekerja dan 1.287 orang penduduk pengangguran. Menurut data Dinas Ketenagakerjaan dalam BPS (2020) jumlah pencari kerja yang terdaftar pada 2020 mencapai 171 orang dengan 47 orang laki laki dan 124 orang perempuan. Terdapat 85,96% merupakan pencari kerja yang merupakan tamatan SMA dan 7,6% merupakan pencari kerja tamatan sarjana. Di Kabupaten Toba pada tahun 2020 sudah terdapat 1.089 perusahaan industri kecil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.924 orang. Industri pakaian jadi dan kulit, dengan 628 perusahaan (57,67 persen) dan tenaga kerja 959 orang, adalah yang terkecil dari industri ini. Menurut kecamatan, Kabupaten Uluan memiliki industri pakaian jadi dan kulit terbanyak, dengan 628 perusahaan yang mempekerjakan 959 orang, dan Tampahan memiliki 115 perusahaan yang mempekerjakan 184 orang. Dengan 135 perusahaan dan 329 karyawan, industri makanan menempati urutan kedua setelah industri pakaian jadi dan kulit. Industri ini terkonsentrasi di Kabupaten Balige, di mana 30 perusahaan mempekerjakan 63 orang di Kabupaten Habinsaran, di mana 14 perusahaan mempekerjakan 14 orang.

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 61.183 pengguna listrik di PT. PLN Cabang Porsea dan Parapat Balige. Berdasarkan jumlah konsumen menurut kecamatan, Balige dan Tampahan memiliki klien terbanyak dengan total 20.562

pelanggan (33,60 persen). Jika berdasarkan KVA yang tersambung Ajibata merupakan kecamatan dengan KVA tersambung terkecil dengan besar 1.485 KVA. Jumlah keseluruhan listrik terjual di tahun 2020 sekitar 38.559.936 Kwh.

2.2 Layanan *E-Government* Di Kabupaten Toba

Keadaan teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini memberikan dampak yang cukup besar bagi manajemen pemerintahan. Menanggapi meluasnya penggunaan internet di pemerintahan dan masyarakat, pemerintah telah menggunakan teknologi digital sebagai sarana untuk mempermudah dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui *E-Government* (Sufianti, 2007).

Keuntungan penerapan *E-Government* dalam pelayanan publik antara lain meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan, mengurangi waktu penyampaian layanan, meningkatkan akurasi, meningkatkan keadilan, dan menghindari korupsi. Organisasi pemerintah pusat, seperti Kementerian Keuangan, dapat menggunakan sistem ini untuk memberikan layanan pajak berkat keunggulan ini. Setiap daerah di Indonesia mengembangkan situs resmi daerahnya sendiri di tingkat pemerintah daerah (pemda). Situs web ini menawarkan informasi tentang setiap wilayah, termasuk profil sejarah pemerintah, profil geografis, dan program dan kegiatan, serta menu interaktif. Namun, tergantung kapasitas masing-masing pemerintah daerah, masing-masing daerah menampilkannya dengan cara yang berbeda. 402 dari 33 provinsi dan 443 kabupaten/kota sudah memiliki website (84 persen), dengan tingkat aksesibilitas yang bervariasi.

Adopsi *E-Government* di pemerintah kota telah berkembang pesat, meskipun ada banyak masalah implementasi. Dikarenakan pengeluaran yang tinggi sementara hasil yang diperoleh tidak selalu memadai, kegagalan ini menyebabkan banyak kelompok menentang penggunaan e-Government di masa depan. Ketidaksiapan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana teknologi informasi, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang situasi dan apa yang akan dicapai dengan penerapan e-gov, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung merupakan faktor-faktor yang berkontribusi. kegagalan ini (Sufianti, 2007).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui teknologi adalah pengenalan *E-Government* oleh pemerintah daerah Kabupaten Toba. Diharapkan setelah *E-Government* diterapkan, semua operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Toba akan dapat ditonton oleh seluruh masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Kabupaten Toba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang telah menerapkan *E-Government* di berbagai wilayah pelayanan, antara lain Portal Utama Kabupaten Toba, *e-planning*, LPSE, e-LPPD, dll. (tobakab.go.id, 2021). Berikut fungsi dari beberapa *E-Government* yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Toba.

1. Portal Utama Kabupaten Toba

Portal utama Kabupaten Toba merupakan website yang berisi informasi umum terkait Kabupaten Toba seperti sejarah pembentukan, letak geografis, berita terkini, dll. Portal utama ini dapat diakses melalui website <https://tobakab.go.id>. Portal ini juga menampilkan layanan *E-Government* lain yang dapat membawa masyarakat untuk memilih layanan yang ada di Kabupaten Toba. Selain itu juga, masyarakat dapat mengakses langsung layanan e-Government dengan memilih layanan publik yang diinginkan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik secara online (tobakab.go.id, 2021).

2. E-Planning

E-planning adalah aplikasi yang mencoba untuk meningkatkan koordinasi dan pemahaman dalam rencana pembangunan daerah antara pemerintah pusat dan lokal. Masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan daerah sebagai akibat dari informasi yang tersedia dalam aplikasi ini. layanan ini dapat diakses melalui <https://eperencanaan.tobakab.go.id>. Pada layanan ini, masyarakat dapat mengakses daftar usulan biaya per kecamatan, sebaran usulan, kamus usulan dan jadwal Musrenbang tanpa harus mempunyai akun. Hal tersebut berguna untuk memberikan transparansi biaya pemerintah daerah yang didapatkan dari pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat tidak perlu mempertanyakan kembali berapa besaran biaya yang didapatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan semua rencana pembangunan di daerah tersebut (tobakab.go.id, 2021).

3. LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa elektronik dan membantu Pejabat Pengadaan dalam pengadaan secara elektronik. Pejabat Pengadaan suatu instansi dapat menggunakan fasilitas LPSE terdekat dengan domisilinya untuk melakukan pengadaan secara online yang tersedia di <http://lpse.tobakab.go.id>.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mendukung proses pemantauan dan audit, serta memenuhi kebutuhan informasi secara real-time dalam rangka mewujudkan “*clean and good government*” dalam pengadaan.

Pasal 73, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang layanan pengadaan secara elektronik, menjadi dasar perundang-undangan untuk menyelenggarakan layanan pengadaan secara elektronik. Dalam menciptakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, LPSE juga harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (tobakab.go.id, 2021).

4. E-Budgeting

E-budgeting adalah sistem komputerisasi untuk menyiapkan anggaran. Aplikasi program komputer berbasis web ini membantu dalam proses penganggaran untuk proyek-proyek pembangunan daerah. Penerapan e-budgeting di Kabupaten Toba akan semakin memudahkan penentuan arah kebijakan pemerintah terkait anggaran tahun berjalan. Tujuan mendasar didirikannya sistem informasi *e-budgeting* ini adalah untuk mewujudkan keterbukaan atau transparansi. Karena dokumentasi penyusunan anggaran telah tercatat dan tersimpan secara otomatis dalam sistem, maka setiap pihak dapat memperoleh data anggaran pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi ini (tobakab.go.id, 2021).

2.3 Cakupan Internet di Kabupaten Toba

Kabupaten Toba memiliki banyak destinasi wisata yang sering mendatangkan pengunjung. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) membangun internet dan wifi di titik lokasi wisata di wilayah Kabupaten Toba khususnya pusat kota Kabupaten Toba yaitu Kecamatan Balige. Pembangunan infrastruktur wifi dan internet di kabupaten ini sudah selesai dibangun sejak tahun 2019. Kecamatan yang telah terpasang internet dan wifi antara lain Kecamatan Balige, Kecamatan Lumbanjulu, Kecamatan Ajibata, dan Kecamatan Laguboti (infopublik.id, 2020).

Hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan, tidak semua kecamatan mendapatkan sinyal internet yang bagus. Tidak semua provider internet memiliki koneksi yang baik. Tiap daerah memiliki kualitas koneksi yang berbeda-beda. Seperti misalnya di Kecamatan Ajibata, provider internet Indosat tidak dapat

digunakan di kecamatan tersebut, dan provider lain hanya memiliki kekuatan sinyal sebesar 2, 31 Mbps dan kekuatan sinyal internet terbesar yaitu mencapai 22,38 Mbps. Layanan pemasangan wifi di Kabupaten Toba juga sudah tersedia, hanya saja tidak memiliki kekuatan sinyal internet yang besar seperti halnya di kota besar. Layanan pemasangan wifi tersebut contohnya adalah Indihome dan MNC Play yang sudah banyak di pasang di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Toba antara lain SMAN 2 Balige, dan SMA Unggul Del di Kecamatan Laguboti. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Toba untuk menerapkan konsep smart city yang dimulai dari kemampuan akses internet di tiap daerah / kecamatan yang ada di Kabupaten Toba (indotelko.com, 2020).

